

Dampak Pengangguran dan Ketimpangan Sosial Terhadap Stabilitas Ekonomi, Sosial, dan Politik di Indonesia

Ahmad Choiri¹, Wahyu Wibowo², Isna Arifa³, Aminuddin⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: choiriahmad119@gmail.com¹, wahyuwibowopenulis@gmail.com², isnaarifa98@gmail.com³, aminuddinse99@gmail.com⁴

Article History:

Received: 30 Januari 2025

Revised: 12 Maret 2025

Accepted: 20 Maret 2025

Keywords: Pengangguran, Ketimpangan Sosial, Stabilitas Ekonomi, Stabilitas Sosial, Stabilitas Politik, Kebijakan Publik

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengangguran dan ketimpangan sosial terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, memanfaatkan data sekunder dari sumber resmi pemerintah dan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi berkontribusi terhadap penurunan daya beli masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan angka kemiskinan. Selain itu, pengangguran yang berkepanjangan berdampak negatif terhadap stabilitas sosial, ditandai dengan meningkatnya angka kejahatan dan masalah kesehatan mental. Ketimpangan sosial dalam distribusi pendapatan, akses pendidikan, dan layanan publik memperburuk kondisi ini, memicu ketidakpuasan masyarakat yang dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan penurunan kepercayaan terhadap pemerintah. Temuan ini menekankan pentingnya kebijakan holistik yang berkelanjutan untuk mengatasi pengangguran dan ketimpangan sosial guna memastikan stabilitas nasional.

PENDAHULUAN

Pengangguran menjadi bagian yang selalu ada di setiap negara. Hal ini dikarenakan bisa memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas suatu negara. Di Indonesia, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2024 tercatat sebesar 4,91%, menurun dari 5,32% pada Agustus 2023 (BPS, 2024). Pada Februari 2024, TPT berada di angka 4,82%, yang menunjukkan tren penurunan yang konsisten sejak beberapa tahun terakhir (Antara, 2024). Pemerintah menargetkan TPT dapat ditekan menjadi 4,5% hingga 5% pada tahun 2025 (NUGRAHA, 2024). Target ini mencerminkan harapan pemerintah untuk terus mengurangi pengangguran melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan optimisme bahwa TPT akan terus menurun seiring dengan meningkatnya jumlah lowongan kerja, meskipun beberapa jenis pekerjaan mungkin akan hilang (Antara, 2024).

Maret 2024 Gini Ratio Indonesia tercatat sebesar 0,379, menunjukkan penurunan

dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 0,388 (Sutrisno, 2024). Dengan nilai Gini Ratio ini, Indonesia termasuk dalam kategori ketimpangan pendapatan sedang. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pengurangan ketimpangan, distribusi pendapatan masih belum merata (RINI et al., 2022). Pengangguran dan ketimpangan sosial memiliki relevansi yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran berkontribusi pada penurunan daya beli masyarakat, yang selanjutnya mengurangi konsumsi agregat dan investasi. Hal ini menciptakan siklus negatif yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Siti Fatimah Azzahra et al., 2024).

Tingkat pengangguran yang tinggi memiliki konsekuensi langsung terhadap stabilitas ekonomi. Ketika banyak individu tidak memiliki pekerjaan, pendapatan masyarakat menurun, yang berujung pada peningkatan kemiskinan. Hal ini dapat mengurangi daya beli masyarakat, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Penurunan produktivitas akibat pengangguran juga dapat menyebabkan penurunan investasi bisnis, karena perusahaan cenderung menunda proyek investasi atau mengurangi pengeluaran modal (Setiawan et al., 2024). Selain itu, pengangguran dapat memicu ketidakpuasan sosial yang berpotensi menimbulkan kerusuhan atau konflik, merusak iklim investasi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil (Karisma, 2024).

Ketimpangan sosial, yang mencakup perbedaan dalam pendapatan, pendidikan, dan akses terhadap layanan publik, dapat memperburuk situasi ekonomi. Kesenjangan yang besar antara kelompok kaya dan miskin sering kali mengakibatkan ketidakpuasan dalam masyarakat. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan memicu ketidakstabilan politik (Ramadhan, 2023). Negara-negara dengan tingkat ketimpangan sosial yang tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi.

Secara sosial, pengangguran dapat meningkatkan angka kriminalitas dan masalah kesehatan mental di masyarakat. Individu yang tidak memiliki pekerjaan sering kali merasa terasing dan frustrasi, yang dapat menyebabkan peningkatan tindakan kriminal sebagai cara untuk bertahan hidup (Setiawan et al., 2024). Ketimpangan sosial juga berkontribusi pada perpecahan dalam masyarakat, di mana kelompok-kelompok tertentu merasa terpinggirkan atau tidak diwakili dalam proses politik. Hal ini berpotensi menciptakan ketegangan antar kelompok yang dapat berujung pada konflik sosial (Karisma, 2024).

Dari perspektif politik, tingginya angka pengangguran dan ketimpangan sosial dapat mempengaruhi stabilitas politik suatu negara. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dapat mendorong gerakan protes atau bahkan revolusi jika tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang inklusif dalam menangani isu-isu ini agar tercipta stabilitas politik yang mendukung pertumbuhan ekonomi (Sari, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengangguran dan ketimpangan sosial terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hubungan antara pengangguran, ketimpangan sosial, dan stabilitas, serta memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut demi mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Konsep Pengangguran

Pengangguran didefinisikan sebagai penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru. Ini juga mencakup mereka yang tidak mencari pekerjaan karena telah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (Sri Hartati, 2021). Sukirno mendefinisikan pengangguran sebagai individu yang tergolong dalam angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Ia menekankan bahwa pengangguran mencerminkan pemborosan sumber daya ekonomi (Nova Rianda, 2020). *International Labour Organization* (ILO) mendefinisikan pengangguran sebagai individu yang tidak memiliki pekerjaan tetapi secara aktif mencari pekerjaan. Definisi ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam pencarian kerja untuk dikategorikan sebagai penganggur (Wulandari, 2020).

Konsep Ketimpangan Sosial

Menurut Andrinof A. Chaniago, ketimpangan sosial dianggap sebagai hasil dari pembangunan yang terlalu berfokus pada aspek ekonomi tanpa memperhatikan aspek sosial. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan di Masyarakat (Firosoya, 2023). Ketimpangan sosial muncul akibat tidak berjalan baik pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan budaya (Yunita, 2025). Selain itu, Jonathan Haughton dan Shahidur R. Khandker mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan, yang sering kali mengakibatkan perbedaan signifikan dalam akses terhadap sumber daya (Firosoya, 2023).

Stabilitas Ekonomi, Sosial, dan Politik

Stabilitas ekonomi didefinisikan sebagai pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa mengalami krisis besar. Menurut penelitian oleh Legesang et al. (2021) stabilitas ekonomi suatu negara menjadi tolok ukur kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas ini sangat bergantung pada sistem moneter dan ekonomi global, serta permintaan domestik yang seimbang. Inflasi yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang adalah indikator penting dari stabilitas ekonomi, di mana inflasi yang terlalu tinggi atau rendah dapat mengganggu kestabilan tersebut (Rahayu & Zaini, 2024).

Stabilitas sosial merujuk pada hubungan harmonis antar kelompok masyarakat. Hubungan ini ditandai dengan keadilan sosial, di mana semua individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan. Penelitian (Agustin et al., 2024) menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dapat menyebabkan ketegangan sosial, sehingga penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kerukunan antar kelompok. Keadilan sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah indikator utama dari stabilitas sosial.

Stabilitas politik didefinisikan sebagai keberlanjutan institusi pemerintahan tanpa gangguan besar. Dalam konteks ini, konsistensi kebijakan publik dan rendahnya tingkat korupsi menjadi indikator penting. Ketika institusi pemerintah mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, stabilitas politik dapat terjaga. Penelitian (Sekarsari et al., 2024) menunjukkan bahwa partisipasi politik yang tinggi, seperti tingkat pemilih dalam pemilu, juga mencerminkan legitimasi pemerintah dan stabilitas politik suatu negara.

Ketiga aspek stabilitas ekonomi, sosial, dan politik saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Memastikan stabilitas di salah satu bidang dapat mendukung stabilitas di bidang lainnya, sehingga penting bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi yang holistik

dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Novalina & Rusdiadi, 2018); dan (Mubyarto & Mutia, 2024).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini mengandalkan sumber data kualitatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk teks, dokumen, dan literatur yang relevan. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan mendalam, memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, di mana peneliti menyajikan informasi secara sistematis dan kritis.

PEMBAHASAN

Pengangguran dan ketimpangan sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Data empiris menunjukkan bahwa kedua faktor ini saling terkait dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Menurut penelitian, pengangguran menyebabkan penurunan konsumsi karena pengurangan pendapatan rumah tangga. Hal ini berujung pada berkurangnya belanja konsumen, yang merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi (Siti Fatimah Azzahra et al., 2024). Selain itu, pengangguran yang berkepanjangan dapat memicu penurunan produk nasional bruto (PNB) dan pendapatan per kapita (Frisnoiry et al., 2024).

Ketimpangan sosial, khususnya dalam distribusi pendapatan, berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan pengangguran. Penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berhubungan langsung dengan tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia (Maskur et al., 2023). Ketika ketimpangan meningkat, masyarakat yang berada di lapisan bawah semakin terpinggirkan, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial dan potensi gejolak politik.

Tingginya angka pengangguran dan ketimpangan sosial dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Data menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi sering kali berujung pada protes sosial dan ketidakstabilan politik. Kesenjangan yang lebar cenderung menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat, yang dapat mengurangi kepercayaan investor dan mempengaruhi investasi serta pertumbuhan ekonomi (Hasibuan, 2023). Pengangguran dan ketimpangan sosial tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi tetapi juga stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Kebijakan publik yang inklusif diperlukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk peningkatan akses pendidikan, penciptaan lapangan kerja, serta reformasi sistem pajak untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih adil (Siti Fatimah Azzahra et al., 2024).

Dampak Pengangguran terhadap Stabilitas Ekonomi, Sosial, dan Politik

Tingkat pengangguran yang tinggi mengakibatkan penurunan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ketika banyak individu tidak dapat berkontribusi secara produktif, *output* nasional menurun, yang pada gilirannya menghambat potensi pertumbuhan jangka Panjang (Frisnoiry et al., 2024). Pengangguran menyebabkan berkurangnya pendapatan pajak pemerintah, karena semakin sedikit orang yang bekerja dan membayar pajak. Hal ini mengurangi dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial (Siti Fatimah Azzahra et al., 2024). Perusahaan cenderung menunda investasi ketika kondisi ekonomi lesu akibat tingginya pengangguran. Ini menciptakan siklus negatif yang lebih lanjut memperburuk kondisi ekonomi (Terkini, 2023).

Pengangguran berkontribusi pada peningkatan tingkat kemiskinan, karena individu

kehilangan sumber pendapatan tetap. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan Pendidikan ((Nova Rianda, 2020). Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat mendorong individu untuk terlibat dalam kegiatan kriminal sebagai jalan keluar. Ini menciptakan masalah keamanan yang lebih besar dalam Masyarakat (Siti Fatimah Azzahra et al., 2024). Pengangguran dapat menyebabkan masalah psikologis seperti depresi dan kehilangan rasa percaya diri, yang berdampak negatif pada kesehatan mental individu hubungan sosial mereka (Harian, 2022).

Tingginya angka pengangguran sering kali menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, yang dapat memicu protes atau demonstrasi besar-besaran. Hal ini menciptakan ketegangan politik dan dapat mengganggu stabilitas pemerintahan (Nova Rianda, 2020) . Ketidakpuasan yang meluas dapat mengarah pada ketidakstabilan politik, di mana masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi pemerintah dan proses demokrasi. Stabilitas politik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ((Siti Fatimah Azzahra et al., 2024).

Pengangguran tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga memiliki efek domino yang luas terhadap ekonomi, struktur sosial, dan stabilitas politik suatu negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang efektif guna mengatasi pengangguran dan mendukung pemulihan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dampak Ketimpangan Sosial terhadap Stabilitas Ekonomi, Sosial dan Politik

Ketimpangan yang tinggi dalam distribusi kekayaan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketika sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok, hal ini mengurangi daya beli masyarakat secara keseluruhan dan menghambat konsumsi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Hababil et al., 2024) . Ketidakmerataan dalam akses terhadap pendidikan dan kesehatan dapat mengurangi mobilitas sosial dan ekonomi, sehingga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Ini menciptakan inefisiensi dalam perekonomian, di mana potensi sumber daya manusia tidak dimanfaatkan secara optimal (Tri et al., 2025) . Ketimpangan yang ekstrem sering kali memaksa pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran dalam bentuk program kesejahteraan sosial dan bantuan kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dapat meningkatkan tekanan pada anggaran negara dan mengurangi investasi di sektor-sektor produktif (Purbandono, 2024).

Ketimpangan sosial-ekonomi sering kali menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan kelompok yang merasa terpinggirkan. Rasa frustrasi ini dapat memicu protes dan kerusuhan sosial, yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial (Hababil et al., 2024) . Ketidakmerataan dalam distribusi kekayaan menciptakan perbedaan signifikan dalam kualitas hidup antara kelompok kaya dan miskin. Hal ini dapat memperburuk ketegangan antar kelompok, menyebabkan polarisasi yang lebih besar dalam Masyarakat (Judijanto & Al-amin, 2025). Ketimpangan sosial juga berkontribusi pada siklus kemiskinan antar generasi. Anak-anak dari keluarga kurang mampu sering kali tidak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, sehingga peluang mereka untuk meningkatkan status ekonomi di masa depan menjadi terbatas (Purbandono, 2024).

Ketidakpuasan masyarakat terhadap ketimpangan sering kali berujung pada ketidakstabilan politik. Masyarakat yang merasa tidak terwakili atau tidak mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi cenderung kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintah, yang dapat memicu konflik dan protes (Tri et al., 2025) . Ketimpangan sosial-ekonomi dapat meningkatkan risiko konflik berskala besar, terutama jika kelompok-kelompok tertentu merasa

terpinggirkan atau tidak mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan (Purbandono, 2024). Untuk mengatasi dampak negatif dari ketimpangan sosial, pemerintah perlu menerapkan kebijakan redistributif yang efektif, seperti reformasi pajak progresif dan peningkatan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan bagi semua lapisan Masyarakat (Judijanto & Al-amin, 2025).

ketimpangan sosial tidak hanya menjadi masalah ekonomi tetapi juga isu kritis yang memengaruhi stabilitas sosial dan politik suatu negara. Upaya untuk mengurangi ketimpangan harus menjadi prioritas bagi pemerintah guna menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengatasi pengangguran dan ketimpangan sosial, terutama dalam konteks pemulihan pasca-pandemi COVID-19.

Kebijakan dalam Mengatasi Pengangguran

Salah satu inisiatif utama adalah penerbitan Kartu Prakerja yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja. Program ini menyediakan pelatihan berbasis kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja di sektor informal yang tergolong rentan dan miskin. Ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi mereka selama masa sulit (Elsaviya & Sari, 2023). Kebijakan insentif pajak penghasilan dan relaksasi pembayaran kredit juga diterapkan untuk mendukung pelaku usaha dan menciptakan lapangan kerja baru (Yessika Nababan et al., 2023). Penyelenggaraan berbagai pelatihan berbasis kompetensi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi fokus untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta mempersiapkan mereka untuk memasuki pasar kerja (Yulna, 2018). Kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja baru, termasuk program padat karya, juga dilaksanakan untuk mengurangi angka pengangguran (Lelau, 2013).

Kebijakan dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial

Pemerintah berupaya membangun dan mengembangkan infrastruktur di daerah tertinggal, yang dapat membuka akses terhadap peluang kerja dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat. Melalui bimbingan teknis dan bantuan modal, pemerintah mendukung UKM agar dapat tumbuh dan bersaing, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketimpangan sosial (Yulna, 2018). Inisiatif pendidikan gratis di berbagai tingkat juga diambil untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan mobilitas sosial (Lelau, 2013).

Evaluasi Kebijakan

Meskipun ada peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja melalui program-program tersebut, tantangan tetap ada dalam hal kesesuaian antara keterampilan yang diajarkan dengan kebutuhan pasar kerja (Saleh, 2024). Beberapa kebijakan masih menghadapi kendala dalam hal aksesibilitas bagi kelompok masyarakat tertentu, terutama di daerah terpencil, yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pemerintah (Al Tuffahati et al., 2023). Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta untuk memastikan efektivitas kebijakan yang diterapkan (Saleh, 2024). Meskipun pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang signifikan dalam mengatasi pengangguran dan ketimpangan sosial, evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian kebijakan diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketimpangan sosial dan pengangguran memengaruhi stabilitas ekonomi, sosial, dan politik Indonesia. Tingkat pengangguran yang tinggi menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan daya beli masyarakat, dan meningkatkan kemiskinan. Tingkat pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan peningkatan masalah kesehatan mental dan kriminalitas, yang mengancam stabilitas sosial. Kondisi ini diperburuk oleh ketimpangan sosial, terutama dalam hal distribusi pendapatan, akses ke pendidikan, dan layanan publik. Kesenjangan ini dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, yang dapat menyebabkan protes sosial dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, yang mengancam stabilitas politik.

Kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan kerja, pemerintah telah menerapkan program seperti Kartu Prakerja dan bantuan sosial. Namun, untuk memastikan bahwa kebijakan berfungsi, evaluasi dan penyesuaian rutin diperlukan. Dibutuhkan juga kebijakan redistribusi ekonomi yang adil untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mendorong investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Dimungkinkan untuk mengembalikan stabilitas di bidang ekonomi, sosial, dan politik Indonesia melalui penerapan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, P. D., Dinanty, D., Nasution, J. H., Pitriyadi, M. S., Islam, U., Sumatera, N., & Ekonomi, S. (2024). *Jurnal Ekonomi Revolusioner Peran Kebijakan Moneter dalam Menjaga Stabilitas*. 7(6), 523–526.
- Al Tuffahati, T., Latif, I. R., Arifa, S., & Mardhatillah, M. (2023). Evaluasi Pilihan Pemerintah Untuk Mengatasi Pengangguran Sarjana dan Meningkatnya Kemiskinan di Aceh Barat. *Journal Of Government Science (Govsci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 8–16. <https://doi.org/10.54144/govsci.v4i1.40>
- Antara. (2024). *Menaker Optimistis Tingkat Pengangguran Kembali Turun pada 2025*. https://www.antarane.ws.com/berita/4291795/menaker-optimistis-tingkat-pengangguran-kembali-turun-pada-2025#google_vignette
- BPS. (2024). *Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Sebesar 4,91 Persen dan Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 3,27 Juta Rupiah Per Bulan*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2373/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-91-persen-.html>
- Elsaviya, F. A., & Sari, I. D. A. F. (2023). Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Masalah Pengangguran di Indonesia Pasca Pandemi Covid -19. *Journal of Economics and Social Sciences (Jess)*, 2(2), 73–79. <https://doi.org/10.59525/jess.v2i2.302>
- Firosya, B. H. (2023). *Ketimpangan Sosial: Pengertian, Contoh, dan Faktor yang Memengaruhi*. Baca Artikel DetikEdu, “Ketimpangan Sosial: Pengertian, Contoh, dan Faktor yang Memengaruhi” *Selengkapnya* <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7012451/ketimpangan-sosial-pengertian-cont>. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7012451/ketimpangan-sosial-pengertian-contoh-dan-faktor-yang-memengaruhi>
- Frisnoiry, S., Sihotang, H. M. W., Indri, N., & Munthe, T. (2024). Analisis Permasalahan Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(1).

- Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-Ekonomi Antar Masyarakat. *Journal Of Macroeconomics And Social Development*, 1(4), 1–9. <https://doi.org/10.47134/jmsd.V1i4.276>
- Harian, K. (2022). *Dampak Pengangguran Terhadap Kehidupan Ekonomi dan Sosial*. <https://kumparan.com/kabar-harian/dampak-pengangguran-terhadap-kehidupan-ekonomi-dan-sosial-1xmw58twm7j/full>
- Hasibuan, R. M. A. (2023). *Pengaruh Kesenjangan Sosial terhadap Stabilitas Ekonomi*. 1–13.
- Judijanto, L., & Al-Amin. (2025). Ketidakmerataan Kekayaan: Kajian Literatur Tentang Implikasi Sosial dan Ekonomi. *Journal of Community Dedication*, 7(2), 61–69. <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Ketidakerataan+Kekayaan.Pdf>
- Karisma, J. (2024). *Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Tengah*.
- Lelau, A. (2013). Kebijakan Pemerintah tentang Penurunan Tingkat Pengangguran di Kota Manado. *Holistic Journal*, 40, 20.
- Maskur, S. R. R., Aedy, H., Saenong, Z., Tajuddin, Alwi, S., & Barani, L. O. S. (2023). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran, dan Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2017-2021. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 82–95. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/jpep>
- Mubyarto, N., & Mutia, A. (2024). *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi : Wawasan dari Kontribusi Ilmiah Terbaru*. 8(4), 1594–1616.
- Rianda, Nova C. (2020). At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah Analisis Dampak Pengangguran Berpengaruh terhadap Individual. *Ilmiah Prodi Muamalah*, 12(1), 17–26. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/tasyriat-tasyri>
- Novalina, A., & Rusdiadi. (2018). Leading Indicator Stabilitas Ekonomi di Negara Civi (China, India, Vietnam dan Indonesia) Pendekatan Panel Ardl. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 1–12. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/539>
- Nugraha, D. W. (2024). *Minimalis, Target Pemerintah Kurangi Pengangguran pada 2025*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/08/18/rintangan-menekan-pengangguran-dan-mengurangi-kemiskinan>
- Purbandono, R. (2024). *Dampak Ketimpangan Ekonomi terhadap Stabilitas Sosial: Analisis Peran Kebijakan Pemerintah Dalam Mengurangi Kesenjangan Ekonomi*. 2(12), 3869–3883.
- Rahayu, E. T., & Zaini, M. (2024). *Analisis Kestabilan Ekonomi Indonesia*.
- Ramadhan, D. R. (2023). *Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran dan Ketimpangan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Di Indonesia*. 1–23.
- Rini, G. A. M. C., Suciptawati, N. L. P., & Utari, I. A. P. A. (2022). Identifikasi Faktor yang Memengaruhi Gini Ratio di Indonesia. *E-Jurnal Matematika*, 11(3), 160. <https://doi.org/10.24843/mtk.2022.V11.I03.P376>
- Saleh, D. (2024). *Reformasi Kebijakan Mengatasi Pengangguran*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/05/06/reformasi-kebijakan-mengatasi-pengangguran>
- Sari, N. A. (2023). *Stabilitas Politik: Pondasi Bagi Pertumbuhan dan Kesejahteraan*. <https://fuad.iainpare.ac.id/2023/11/stabilitas-politik-pondasi-bagi.html>
- Sekarsari, D., Az Zahra, F. A., Ayuningtyas, F. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis Dinamika Inflasi dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Ekonomi Di Indonesia. *Journal of*

-
- Macroeconomics and Social Development*, 1(3), 1–9.
<https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i3.194>
- Setiawan, E. D., Mahendra, F. H., Seliana Herawatie, N., & Kusmawati, A. (2024). Analisis Tingkat Pengangguran Sebagai Masalah Sosial yang Tak Kunjung Usai. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 2(1), 312–322.
- Siti Fatimah Azzahra, Lystiana Dewi Putri, Fachriza Yunanda Purba, Dahri Tanjung, Ajeng Rezkitaputri, & Ratu Zaskia Daimatul Zulva. (2024). Dampak Pengangguran Terhadap Stabilitas Sosial dan Perekonomian Indonesia. *Menawan: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(4), 220–233. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i4.719>
- Sri Hartati, Y. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 79–92. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.74>
- Sutrisno, E. (2024). *Tingkat Ketimpangan Indonesia Alami Penurunan*. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8406/tingkat-ketimpangan-indonesia-alami-penurunan?lang=1>
- Kumparan.com. (2023). *Dampak Negatif dari Pengangguran Terhadap Kestabilan Sosial Ekonomi dan Politik*. <https://kumparan.com/berita-terkini/dampak-negatif-dari-pengangguran-terhadap-kestabilan-sosial-ekonomi-dan-politik-21wjfbiuid>
- Tri, D., Manik, S., Nasution, N. F., Safitri, S., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). *Aspek Ekonomi Dan Sosial*. 3.
- Wulandari, S. (2020). Jenis-Jenis Pengangguran. *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*, 11–35.
- Yessika Nababan, A., Rahmawati, E., Gilbert Saputra, E., Rivanti, F., & Michelle, M. (2023). Analisa Kebijakan Pemerintah Kota Batam Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 2(2), 178–184. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i2.886>
- Yulna, D. H. (2018). Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Pengangguran. *Economica*, 1(2), 208–213. <https://dickyfivers.wordpress.com/2012/04/28/strategi-dan-kebijakan-pemerintah-dalam-menanggulangi-pengangguran/>
- Yunita, O. (2025). *Ketimpangan Sosial: Pengertian, Penyebab, Bentuk & Dampak*. <https://www.brainacademy.id/blog/ketimpangan-sosial>